

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT  
GUBERNUR JAWA BARAT OLEH MENDAGRI  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG -  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL  
NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

**Oleh :**

**Pandu Alfarisyi Giantara Yuda**

**41151010140132**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing :**

**Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2018**

***JURIDICAL REVIEW OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS  
BASED ON THE LAW NUMBER 10 OF 2016 ABOUT THE  
ELECTION IS RELATED TO THE LAW NUMBER 5 OF 2014  
ABOUT THE APPARATUS CIVIL***

***THESIS***

*This Thesis Applies To Fulfill The Final Assignment Session And Obtain The Law  
Degree Of Langlangbuana University Bandung*

***By:***

**Pandu Alfarisyi Giantara Yuda**

**4115101040132**

***Advisor :***

**Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.**



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG***

***2018***

## **PERNYATAAN**

Nama : Pandu Alfarisyi Giantara Yuda

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140132

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT GUBERNUR JAWA BARAT OLEH MENDAGRI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”.

Menyatakan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 7 Oktober 2018

Panduan Alfarisyi Giantara Yuda  
(41151010140132)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah , Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. Dalam implementasi kebijakan pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat *Komjen Mochamad Iriawan*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif - analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis - normatif, maka untuk mencari data yang digunakandititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui data pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat *Komjen Mochamad Iriawan* sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat *Komjen Mochamad Iriawan* tersebut tidak melihat Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi tidak sesuai pengangkatan Pejabat Gubernur oleh Menteri Dalam Negri tersebut.

## **ABSTRACT**

*This study is motivated by the issuance of the law number 10 of 2016 about the Election of regional heads, the law number 5 of 2014 about the apparatus civil, and the Indonesia Minister of Home Affairs's rule no. 1 of 2018 is about coverage leaving abroad. In the implementation of the policy of the inauguration of executor West Java Governor, Komjen Pol. Drs Mochamad Iriawan, S.H., MM., M.H.*

*The type of this research is descriptive-analysis research. It's meant this study is intended to describe how the position of the law number 10 of 2016 about the election of the regional heads and the law number 5 of 2014 about the apparatus civil. This study used a juridical-normative approach. In finding the data, this study used emphasized on secondary data, library data.*

*This result of the study indicates that the inauguration of the executor West Java Governor Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. by President who appoints the Minister of Home Affairs, related to the law number 10 of 2016 about the election of regional heads. However, the Minister of Home Affairs has ruled out the law number 2 of 2002 about the Indonesian National Police, which is clearly regulated in article 28 paragraph (3). It states that "the members of the Indonesian National Police can occupy the position at the outside of police after resigning or retiring from the police service".*

## **KATA PENGANTAR**

Pertama - tama Penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat – nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT GUBERNUR JAWA BARAT OLEH MENDAGRI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H.,M.H. Sekalu Dosen Pembimbing dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr.Hj. Widjajani, Ir., M.T. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Ibu Dr. Hj Hernawati RAS, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dini Randania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas langlangbuana Bandung, terimakasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini. khususnya kelas A2 Tri Abdi Purnomo, Jefri, Anton Fuziana, Putri Indri Rachmawati, Gusyina yusuf, Ketty sakinah, Yandrizardi, Ulfah Dwi Salsabilah, Mega Sugih, Adinda, Aang suangga, Rhaga Esa Jiwana, Indra Prasetyo, Nanda Faisal Gunawan, Adinda Puspita Juanda, Fhatya Putri Sarah.
12. Seniorku, Rakanda Rizky Malinto Ramadani S.H., Rakandita Diliya Rinjani S.H., Rakanda Dadan Triatna S.E., Rakanda Nurdin Cahyadi S.T.,

dan seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas  
Langlangbuana Bandung.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ibunda Herlia Wati dan Ayahanda Yuyun Yuda Wahyudi yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis baik secara materi maupun non materi, serta adikku Difa Al.Ghifari Giantara Yuda, dan Ardea Rizki Al.Afgani Giantara Yuda. Serta kepada Ibu Lisis mulyati dan Puspita Gita Kemala Imani yang selalu menjadi penyemangat penulis. Serta semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dengan diiringi harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan bahan referensi bidang Hukum Tata Negara.

Bandung, 7 Oktober 2018

Penulis

Pandu Alfarisyi Giantara Yuda



## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN ..... i**

**ABSTRAK ..... ii**

**KATA PENGANTAR ..... iii**

## DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 3

C. Tujuan Peneliti Masalah..... 3

D. Kegunaan Peneliti ..... 4

E. Kerangka Pemikiran ..... 4

F. Metode Penelitian ..... 7

**BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI NEGARA, KEPALA DAERAH,  
KEWENANGAN, DAN TEORI KEKUASAAN DALAM SISTEM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....10**

A. Pengertian negara ..... 10

1. Negara ..... 10

2. Unsur - Unsur Negara ..... 14

3. Fungsi Negara ..... 15

4. Sifat Negara ..... 15

B. Teori Tentang Pemerintahan Daerah .....	16
C. Teori Tentang Kewenangan .....	20
1. Kewenangan .....	20
2. Pengertian Kewenangan .....	22
3. Sifat Kewenangan .....	27
4. Sumber Kewenangan .....	28
D. Teori Tentang Kekuasaan .....	29

**BAB III IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT  
GUBERNUR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA.....32**

A. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara .....	32
B. Fungsi Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara .....	37
C. Implikasi Hukum Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara .....	38
D. Kedudukan, Fungsi, dan implikasi Hukum Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara .....	43

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT  
GUBERNUR JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA DIHUBUNGGAN  
DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA .....49**

- A. Legalitas Pengangkatan Pejabat Gubernur Berdasarkan Undang - Undang  
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Daerah ..... 49
- B. Kedudukan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada  
Bertentangan Dengan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara ..... 53

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....66**

Kesimpulan .....66

Saran .....67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**